

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pengujian ditemukan bahwa Kontribusi Pajak Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo selama tahun 2011-2015..
2. Berdasarkan pengujian ditemukan bahwa Kontribusi Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo tahun 2011-2015.
3. Berdasarkan pengujian ditemukan bahwa Kontribusi Pengelolaan yang dipisahkan tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo selama tahun 2011-2015.
4. Berdasarkan pengujian ditemukan bahwa Kontribusi Lain-lain PAD yang sah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo tahun 2011-2015.
5. Berdasarkan pengujian simultan ditemukan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah tidak berpengaruh simultan terhadap belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo. Hal tersebut juga terlihat dari nilai *Adjusted R_{square}* sebesar 2,3919%.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlunya perhatian yang besar oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo terkait pemungutan pajak daerah karena hampir semua kabupaten terlihat fluktuatif. Cara yang perlu dilakukan yakni dengan tindakan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo
2. Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo seharusnya lebih memaksimalkan semua potensi terkait retribusi daerah agar pendapat asli daerah yang diperoleh melalui peran dari Dewan Riset Daerah (DRD) dalam penelitian dan pengembangan kebijakan pimpinan atau kepala daerah daerah dalam penetapan kebijakan terutama mengenai retribusi daerah
3. Pada Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Bone Bolango sebaiknya melakukan analisis dan pengawasan yang ketat terkait pemungutan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan karena Kabupaten Gorontalo utara dan Bone Bolango merupakan kabupaten yang baru berdiri.
4. Sebaiknya dalam rangka mengembangkan lain-lain PAD yang sah, sebaiknya pihak Pemerintah Kabupaten?Kota berhati-hati dalam pengelolaan hasil lain-lain PAD terutama yang berasal dari penjualan

aset. Karena masalah yang terjadi terkait dengan pemeriksaan BPK yakni mengenai aset.

5. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambahkan beberapa variabel lain dalam mengembangkan judul ini karena nilai *Adjusted R Square* masih kurang. Variabel-variabel tersebut dapat berupa dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Abdul dan Ririn Wulandari. 2012. analisis pengaruh EQUALIZATION grant, sumber kemandirian fiskal, sumber pembiayaan defisit, dan faktor penyerap fasilitas publik terhadap belanja modal daerah. *Jurnal Institut Perbanas*.
- Darise, Nurlan. 2008. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Indeks
- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah (Ragkuman 7 Undang-undang, 30 Peraturan Pemerintah dan 15 Permendagri)*. Jakarta: PT. Indeks.
- Hadisaputro, Mandar Trisno. 2012. Belanja Barang Dan Belanja Modal Dalam Perolehan Dan Pemeliharaan Barang Milik Negara Dengan Dana DIPA. *Artikel* (www.mudjisantosa.net).
- Halim, Abdul. 2008. *Manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Hidayat, Mohammad Fajar. 2014. judul analisis pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap alokasi belanja modal (studi pada kabupaten dan kota di jawa timur). *Jurnal Universitas Brawijaya*.
- Ishak. Iswandi. 2013. Pengertian Belanja Modal Dan Jenisnya. <http://portalpbj.blogspot.com/2013/06/pengertian-belanja-modal-dan-jenisnya.html>
- Kuncoro, Mudrajat. 2001. *Metode Kuantitatif : Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta : UPP-AMP YKPN
- Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mahsun, Mohamad, 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Nadeak, Ruslina. 2003. *Analisis Rasio Keuangan Pada APBD Untuk Menilai Kinerja Pemerintah Daerah*. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Sanata Dharma.
- Nordiawan, Dedi dkk. 2007. *Akuntansi Pemerintahan* , Jakarta : Salemba Empat.

- Panggabean, Henri Edison. 2009. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Toba Samosir. *Tesis Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatra Barat*.
- Setiawan, Anjar. 2010. Pengaruh dana alokasi umum (DAU) Dan pendapatan asli daerah (PAD) Terhadap belanja daerah (Studi kasus pada provinsi jawa tengah). *Skripsi*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarmi, Saptaningsih. 2012. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja modal Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi D.I. Yogyakarta. *Jurnal*.
- Swandewi. 2014. perimbangan dan kemandirian keuangan daerah terhadap keserasian anggaran dan kesejahteraan masyarakat pada kabupaten/kota di provinsi bali. *Jurnal Universitas Udayana Bali*.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang sumber-sumber pendapatan asli daerah
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah